

**ANALISIS KEBIJAKAN MONETER  
DAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK TERHADAP  
INFLASI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM  
TAHUN 2017 – 2020**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**M. Ridhano Yudistira  
NPM 1651010435**



**Program Studi Ekonomi Islam**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS KEBIJAKAN MONETER  
DAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK TERHADAP  
INFLASI DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM  
TAHUN 2017 – 2020**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh**

**M. Ridhano Yudistira  
NPM 1651010435**

**Pembimbing I: Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.**

**Pembimbing II: Femei Purnamasari, S.E., M.Si.**

**Program Studi Ekonomi Islam  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Inflasi merupakan salah satu petunjuk makro ekonomi bagi kestabilan ekonomi sesebuah negara, kerana perubahan dalam penunjuk ini mempengaruhi dinamik inflasi. Inflasi adalah fenomena monetari dalam sesebuah negara, kenaikan atau penurunan inflasi cenderung menimbulkan keresahan ekonomi akibat perubahan harga. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan sebenar rakyat semakin merosot, maka taraf hidup rakyat akan menurun. Inflasi yang tidak menentu akan mewujudkan ketidakpastian dalam membuat keputusan bagi pelaku ekonomi, kerana ketidakpastian ini menjadikan keputusan pelaburan dan penggunaan rakyat lebih sukar, yang akhirnya akan menyekat inflasi. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Moneter (Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar) dan Transaksi Uang Elektronik Secara Parsial dan Simultan terhadap Inflasi di Indonesia 2017 – 2020.

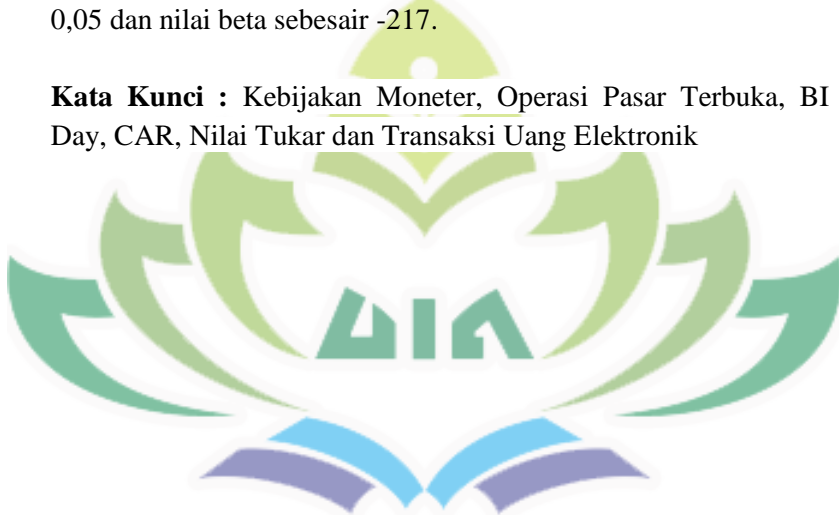
Dengan tujuan untuk memilih atau menentukan suatu sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan secara khusus oleh peneliti. Dailaim penelitiain ini peneliti secara khusus menggunakan data dairi daitai Inflasi, Operaaisi Paisair Terbukai, BI 7 Daiy, CAIR, Nilai Tukair dain Trainsaiksi Uaing Elektronik dari Tahun 2017 sd 2020, karena keterbatasan kelengkapan data dari kesulurahan varibel sehingga hanya dapat mengambil sampel selama 4 tahun (2017-2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time series). Data time series merupakan data yaing dikumpulkan dari waktu ke waktu secara ber-urutan paidai satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Alat uji analisis data yaing digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, yaitu analisis regresi dengain dua atau lebih vairiaibel bebas (independent variable).

OPT terhaidaip Inflasi yaitu tidaik signifikan dan bertanda negatif. Dibuktikan dengan nilai sig untuk pengairuh OPT terhaidaip Inflaisi aidailaih sebesair  $0,396 > 0,05$  dan nilaii beta  $-0,146$ . BI 7

Day terhadap Inflasi yaitu signifikan dan bertanda positif. Dibuktikan dengan nilai sig untuk pengaruh BI 7 Day terhadap Inflasi adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai beta sebesar 1,115. CAR terhadap Inflasi yaitu tidak signifikan dan bertanda positif. Dibuktikan dengan nilai sig untuk pengaruh CAR terhadap Inflasi adalah sebesar  $0,330 > 0,05$  dan nilai beta sebesar 0,023. Nilai Tukar terhadap Inflasi yaitu signifikan dan bertanda positif. Dibuktikan dengan nilai sig untuk pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi adalah sebesar  $0,027 < 0,05$  dan nilai beta sebesar 907. Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi yaitu tidak signifikan dan bertanda negatif. Dibuktikan dengan nilai sig untuk pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi adalah sebesar  $0,467 > 0,05$  dan nilai beta sebesar -217.

**Kata Kunci :** Kebijakan Moneter, Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Moneter Dan Transaksi Uang Elektronik Terhadap Inflasi Di Indonesia Dalam Persepektif Islam Tahun 2017-2020**

**Nama : M. Ridhano Yudistira**

**NPM : 1651010435**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Any Eliza, S.E., M.Akt.**

**NIP. 198308152006042004**

**Femei Purnamasari, S.E., M.Si.**

**NIP. 19840521201532004**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.Si**

**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Moneter Dan Transaksi Uang Elektronik Terhadap Inflasi Di Indonesia Dalam Persepektif Islam Tahun 2017-2020” disusun oleh **M. Ridhano Yudistira, NPM. 1651010435** Program Studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 November 2021.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.**

**Sekretaris : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy.**

**Penguji I : Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag.**

**Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Akt**

**Penguji III : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 196009012003121001**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

(Q.S. Surat Luqman Ayat 34)

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ  
عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

*“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia.*

*Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.”*

(Hadist Riwayat Muslim No. 3407)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Betuk Suparno, S.E. dan Ibu Sri Wahyuni, S.E yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya mencurahkan kasih sayang nya untuk ku, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintai, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras, tak kenal letih dan selalu menyebut nama ku dalam setiap lantunan do'anya, mereka adalah orang tua yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Aamiin.
2. Almamater Universitas Islam Negrei Raden Intan Lampung yang kubangga kan.





## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Oktober 1998 dan dianugerahi sebuah nama yaitu Muhammad Ridhano Yudistira. Penulis adalah Anak kedua dari pasangan Bapak Betuk Suparno, S.E. dan Ibu Sri Wahyuni, S.E.

Riwayat yang ditempuh oleh penulis yaitu :

1. SD Negeri 2 RawaLaut Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, tamat dan berijazah pada tahun 2010.
2. SMP Kartika II-2 Bandar Lampung, Kecamatan -, tamat dan berijazah pada tahun 2013.
3. SMA Negeri 2 Bandar Lampung, tamat dan berijazah pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberika izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Madnasir, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberi arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilih judul skripsi ini.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak.,Akt. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini dan Ibu Femei Purnamasari, S.E., M.Si. selaku pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orangtua tercinta Bapak Betuk Suparno, S.E. dan Ibu Sri Wahyuni, S.E. yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis.

6. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam 2016, terkhusus Ekonomi Islam kelas F, serta teman-teman KKN 27 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama, memberikan cerita dan ceria dalam proses perkuliahan dan diluar perkuliahan.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan reverensi buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudahmudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, November 2021

Muhammad Ridhano Yudistira  
NPM 1651010435

## DAFTAR ISI

### COVER

ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Penelitian Terdahulu .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	21

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka .....	23
1. Inflasi .....	23
2. Kebijakan Moneter.....	27
3. BI Rate dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate .....	29
4. Operasi Pasar Terbuka .....	31
5. Kurs .....	32
6. Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ).....	36
7. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Inflasi .....	42
a. Teori Inflasi dalam Perspektif Islam .....	42
b. Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter .....	50
B. Kerangka Berfikir .....	51

C. Hipotesis .....	53
--------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	55
B. Populasi dan Sampel .....	56
C. Definisi Operasional Variabel .....	56
D. Metode Pengumpulan Data .....	59
E. Metode Analisis Data .....	59
1. Uji Asumsi Klasik .....	60
2. Uji Hipotesis .....	62
3. Koefisien Determinasi .....	63
4. Analisis Regresi Berganda .....	63

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian Pengembangan .....	65
1. Gambaran Umum Negara Indonesia .....	65
2. Gambaran Umum Penelitian .....	67
B. Deskripsi dan Analisis Data Hasil Uji Coba .....	72
1. Pengaruh Kebijakan Moneter OPT, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi tahun 2017 -2020 .....	72
2. Koefisien Determinasi .....	80
3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	80
C. Kajian Produk Akhir .....	83
1. Pengaruh Kebijakan moneter (OPT, BI7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik) secara parsial Terhadap Inflasi .....	83
2. Pengaruh Investasi, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2008-2017 .....	86
3. Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	87

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

### **DAFTAR RUJUKAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran .....	4
Tabel 2.1 Fasilitas Uang Elektronik <i>registered</i> dan <i>unregistered</i> .	38
Tabel 2.2 Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya .....	40
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	58
Tabel 4.1 Perkembangan Inflasi Di Indonesia Tahun 2017-2020.	67
Tabel 4.2 Perkembangan OPT di Indonesia tahun 2017-2020.....	68
Tabel 4.3 Perkembangan CAR di Indonesia tahun 2017-2020.....	69
Tabel 4.4 Perkembangan BI 7 Day di Indonesia tahun 2017- 2020 .....	69
Tabel 4.5 Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia tahun 2017- 2020 .....	70
Tabel 4.6 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik di Indonesia tahun 2017-2020 .....	71
Tabel 4.7 Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test.....	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolineritas .....	74
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi .....	75
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	76
Tabel 4.11 Hasil Uji T .....	77
Tabel 4.12 Hasil uji F .....	79
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	80
Tabel 4.14 Hasil regresi linier berganda .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Inflasi Administered Prices .....	7
Gambar 1.2 Inflasi IHK dan Komponen.....	9
Gambar 1.3 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik .....	10
Gambar 2.1 Produk - Produk Uang Elektronik .....	39
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	72



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan latar belakang masalah dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam penulisan ini dengan haapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Kebijakan Moneter dan Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2017 – 2020 dalam Persepektif Islam”** yang akan diuraikan istilah–istilah diatas sebagai berikut.

Analisis adalah kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang sedang terjadi dan memutuskan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.<sup>1</sup>

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga.<sup>2</sup> Inflasi bisa berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian tergantung parah atau tidaknya inflasi. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian.<sup>3</sup>

Kebijakan moneter adalah merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 842.

<sup>2</sup>Mc Eachern, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. (2000:133)

<sup>3</sup>Baasir, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Periode 2000.1-2011.4* (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/economics>) (2003;265)

yang diinginkan.<sup>4</sup> Kebijakan moneter yang dianalisa berupa, operasi Pasar Terbuka Fasilitas Diskonto merupakan naik turunnya tingkat Suku Bunga, Rasio Cadangan Wajib dari batas maksimum dan minimum Capital Adequacy Ratio, Nilai tika mata uang<sup>5</sup>

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah salah satu kebijakan dari bank sentral dengan cara memperjual-belian surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Bila Bank Sentral bermaksud mengurangi jumlah uang beredar (kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat) dilakukan dengan menjual surat berharga (open market selling).

BI-7 Day adalah penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru.

Kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nilai mata uang punya peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama.

Transaksi Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.<sup>6</sup> Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan

---

<sup>4</sup>Perry Warijyo, Solikin, *Kebijakan moneter di indonesia*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), h.2.

<sup>5</sup>Baroroh dalam Hudaya (2011:28)

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19.

empat bagian nyata dari pengetahuan,; Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah Mengukur tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2017 – 2020 yang dipengaruhi Kebijakan Moneter dan Transaksi Uang Elektronik.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan perekonomian yang sebenarnya terarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu Negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional.<sup>8</sup> Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai. Selain itu juga digunakan untuk membuat prediksi tentang pertumbuhan ekonomi di negara tersebut pada masa yang akan datang. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menunjukkan tingkat kinerja ekonomi (*economic performance*) yang baik, walaupun belum sampai melihat lebih jauh ke tingkat kesejahteraan yang merata di masyarakatnya. Tapi, dengan diketahui data pertumbuhan ekonominya, kita melihat bagaimana perkembangan perekonomian negara tersebut dari waktu ke waktu dan dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dalam pembangunan ekonominya.<sup>9</sup>

Salah satu indikator makro ekonomi guna melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah melalui inflasi, sebab perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika inflasi. Inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu Negara, naik atau turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi akibat perubahan harga. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi pernah terjadi selama periode 1961-1966 sebesar 600% terutama disebabkan oleh usaha

---

<sup>7</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.11.

<sup>8</sup>Sadono sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h.85.

<sup>9</sup>Yana Rohma, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1999-2011* (Bandung 2012).



pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanja dengan menciptakan uang<sup>10</sup>, sehingga jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap laju inflasi di Indonesia. Dalam laporan tahunan 1998/1999 Bank Indonesia, inflasi tinggi juga pernah terjadi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 sebesar 77,6%, meningkatnya harga terutama dari sisi penawaran akibat penurunan nilai tukar (depresiasi) rupiah yang sangat tajam, depresiasi rupiah mencapai tingkat terendah yaitu Rp 16.500 per dolar pada bulan Juni 2008.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran**

Komponen	2018				2019	2019				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,35	4,70	3,64	3,84	3,89	1,82	5,33	3,12	3,64	0,02
Pertambahan dan Penggalian	1,06	2,65	2,67	2,25	2,16	2,32	-0,71	2,34	1,22	0,45
Industri Pengolahan	4,61	3,89	4,36	4,25	4,27	3,85	3,54	4,14	3,80	2,06
Pengadaan Listrik dan Gas	3,31	7,56	5,58	5,46	5,47	4,12	2,20	3,75	4,04	3,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	4,31	6,21	7,91	5,56	8,95	8,33	4,85	6,83	4,56
Konstruksi	7,35	5,73	5,79	5,58	6,09	5,91	5,69	5,65	5,76	2,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	4,98	5,21	5,26	4,41	4,97	5,21	4,63	4,43	4,62	1,60
Transportasi dan Pergudangan	8,49	8,73	5,74	5,49	7,06	5,45	5,88	6,66	6,40	1,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	5,62	4,96	5,96	5,68	5,87	5,53	5,41	5,80	1,95
Informasi dan Komunikasi	7,76	5,11	2,71	7,09	7,02	9,06	9,60	9,24	9,41	9,80
										0,88

<sup>10</sup> Sunarjo, (2002:2)

Jasa Keuangan dan Asuransi	4,30	3,09 7,926,23	4,17	7,23	4,49	6,15	6,60	10,62	
								1,03	
Real Estat	3,08	2,96 6,124,16	3,48	5,40	5,71	5,97	5,74	3,79	
								2,30	
Jasa Perusahaan	8,04	8,89 13,568,94	8,64	10,36	9,94	10,22	10,25	5,39	-
								12,09	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,77	7,16 5,847,13	7,00	6,41	8,85	1,87	4,67	3,16	-
								3,22	
Jasa Pendidikan	4,84	5,04 12,464,96	5,35	5,64	6,31	7,81	6,29	5,89	
								1,21	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	7,07 5,06 7,84	7,15	8,64	9,13	9,18	8,68	10,39	
								3,71	
Jasa lainnya	8,42	9,20 5,06 9,05	8,97	9,97	10,72 10,78	10,71	10,55	7,09	-
								12,60	
<b>PDB</b>	<b>5,06</b>	<b>5,27</b> <b>5,175,18</b>	<b>5,17</b>	<b>5,07</b>	<b>5,05</b>	<b>5,02</b>	<b>5,02</b>	<b>2,97</b>	<b>-</b>
								<b>5,32</b>	

Sumber: BPS

Tabel 1.1 diatas menjelaskan pertumbuhan ekonomi dari Pendapatan Nasional sisi pengeluaran, Produk Domestik Bruto Indonesia dari tahun 2018 sd 2020 mengalami penurunan hingga minus -5,32 ditahun 2020 hingga pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan apabila inflasi tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisisosial ekonomi masyarakat.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, karena dengan ketidakpastian ini akan menyulitkan keputusan masyarakat untuk melakukan investasi maupun konsumsi yang pada akhirnya akan menghambat inflasi.

Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.<sup>11</sup>

Bank Indonesia dapat mempengaruhi inflasi melalui

<sup>11</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

kebijakan moneter. Dalam Bank Indonesia menyatakan harapannya adalah sasaran (target) inflasi Bank Indonesia diacu oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat sama atau mendekati sasaran inflasi, apabila kondisi ini terjadi maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia pada dasarnya mempunyai tugas untuk memelihara system moneter agar bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan tanpa mengakibatkan inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apabila jumlah uang beredar bertambah sebanyak 5%, maka tingkat harga-harga juga akan bertambah sebanyak 5%. Atau sebaliknya, apabila jumlah uang beredar berkurang sebesar 5%, maka tingkat harga-harga akan berkurang sebesar 5%<sup>12</sup>. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi perubahan inflasi sehingga Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework, yang mencakup elemen dasar yaitu penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional, perumusan kebijakan moneter, strategi komunikasi yang lebih transparan, dan penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

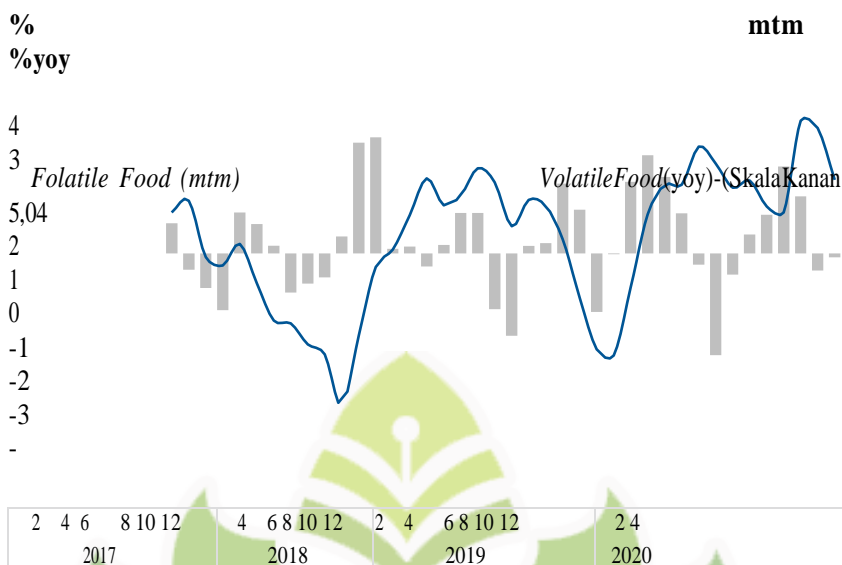
Inflasi juga bisa dipengaruhi oleh nilai tukar, inflasi yang terjadi pada masa krisis ekonomi terutama disebabkan oleh penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.<sup>13</sup> Kontribusi impor terhadap pembentukan output domestik sangat besar, yang artinya sifat barang impor tersebut sangat penting terhadap penentuan harga di negara importir, maka kenaikan harga barang impor akan menyebabkan tekanan inflasi di dalam negeri yang cukup besar, selain itu semakin rendah derajat kompetisi yang dimiliki oleh barang impor terhadap produk dalam negeri akan semakin besar pula dampak perubahan harga barang impor tersebut terhadap inflasi domestik.

---

<sup>12</sup> Sukirno (2002: 222)

<sup>13</sup> M.N. Dalal dan G. Schachter dalam Admadja (1999: 54)

**Gambar 1.1**  
**Inflasi Administered Prices**



Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia tahun 2020 mencapai 5,04 %, Inflasi yang tinggi dan tidak stabil begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang selalu meningkat. Karena permasalahan inflasi bukan permasalahan yang ringan dan menyangkut banyak aspek, maka perlu pencegahan agar tidak terjadi inflasi yang berat. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam pengendalian inflasi, untuk itu perlu dideteksi faktor-faktor moneter yang mempengaruhi inflasi.

Tingkat dan Volatilitas inflasi di Indonesia lebih tinggi di bandingkan dengan inflasi di Negara-negara berkembang lain. Sementara negara- negara berkembang lainnya mengalami tingkat inflasi diantar 3-5 persen, per tahun, pada periode 2005-2014, Indonesia malah memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode yang sama.

Faktor Penyebab Inflasi dalam Perekonomian: Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation), Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation), Bertambahnya Jumlah Uang Beredar

(JUB), Inflasi Campuran (Mixed Inflation), Inflasi Ekspektasi (Expected Inflation), Struktural Ekonomi yang Kaku, Kekacauan Ekonomi dan Politik, Keputusan Perusahaan, Utang Nasional, Luar Negeri.

Salah satu indikator makro ekonomi guna melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah melalui inflasi, sebab perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika Inflasi. Inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu Negara, naik atau turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi akibat perubahan harga. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi pernah terjadi selama periode 1961-1966 sebesar 600% terutama disebabkan oleh usaha pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanjadengan menciptakan uang<sup>14</sup>, sehingga jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap laju inflasi di Indonesia. Dalam laporan tahunan 1998/1999 Bank Indonesia, inflasi tinggi juga pernah terjadi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 sebesar 77,6%, meningkatnya harga terutama dari sisi penawaran akibat penurunan nilai tukar (depresiasi) rupiah yang sangat tajam, depresiasi rupiah mencapai tingkat terendah yaitu Rp 16.500 per dolar pada bulan Juni 2008.

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang terefleksi dalam inflasi yang stabil, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Target inflasi tahun 2020 ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar  $3,0 \pm 1\%$ , dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Sesuai dengan bidang tugasnya, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter, makro prudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Hubungan antara kebijakan moneter dengan inflasi salah satu cara menekan angka inflasi, kebijakan moneter yaitu kebijakan mengurangi mata uang yang beredar sehingga permintaan akan barang dan jasa menurun karena masyarakat menghemat penggunaan uang dan harga barang dan jasa pun

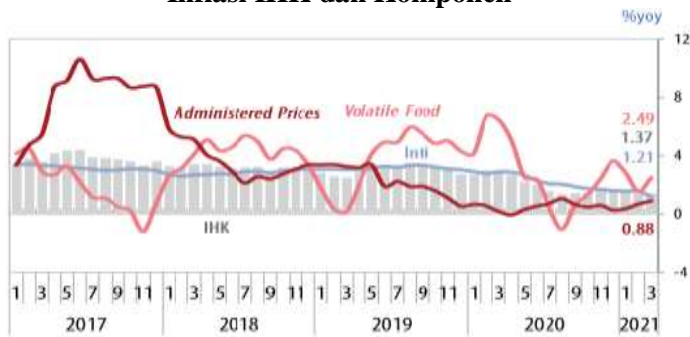
---

<sup>14</sup> Sunarjo, (2002:2)



menjadi turun. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai.

**Gambar 1.2**  
**Inflasi IHK dan Komponen**



Kebijakan moneter dapat menurunkan inflasi dengan cara menurunkan jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga SBI, dalam kebijakan moneter, transaksi non tunai mempengaruhi tingkat jumlah uang beredar di masyarakat. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu inflasi. Transaksi non tunai pada penelitian ini menggunakan ATM debit, ATM kredit dan uang elektronik.

Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh jumlah uang, dengan asumsi kecepatan perputaran uang dan volume barang yang diperdagangkan tetap. Teori tersebut dibantah oleh Keynes. Keynes mengungkapkan bahwa jumlah uang bukan satu satunya penyebab inflasi. Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya.

Keynes berpendapat bahwa kecepatan perputaran uang tidak konstan atau berubah-ubah. Apabila terjadi penambahan pada uang beredar maka transaksi yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkat. Fenomena tersebut selanjutnya akan meningkatkan permintaan output oleh masyarakat. Ketidakmampuan penawaran output dalam memenuhi permintaan tersebut memicu timbulnya inflasi. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Milton Friedman dalam teori kuantitas modern. Menurut Friedman perputaran uang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berbagai macam faktor tersebut di antaranya yaitu: tingkat harga umum, penghasilan dari obligasi

dan saham, inflasi, selera, teknologi dan transportasi, serta perbandingan kesejahteraan antara manusia.

Penelitian dan teori yang ditunjukkan di atas membuktikan bahwa kecepatan perputaran uang bersifat tidak konstan. Pada negara maju inflasi mengalami penurunan drastis. Hal tersebut tidak disebabkan oleh kebijakan moneter melainkan karena penggunaan alat pembayaran non tunai.

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Transaksi Uang Elektronik**



Isu kebijakan moneter yang terjadi yang pertama adalah defisit neraca transaksi berjalan masalah ini sudah dihadapi sejak 2011 dan semakin melebar pada 2013. "Defisit kuartal II 2013 mencapai 4,4 persen. Bank Indonesia telah melakukan upaya dengan menaikkan suku bunga, mengerem impor, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sedangkan pemerintah berupaya dengan kebijakan fiskal, pajak, dan melakukan konversi energi. Masalah kedua yang sedang dihadapi Indonesia adalah ketidakseimbangan fiskal, jika tidak dilakukan penghematan, defisit fiskal akan mencapai 4,69 persen. "Angka yang belum pernah dicapai sejak krisis 1997-1998, Terakhir adalah masalah dalam sektor riil. Dua sektor yang paling utama adalah defisit energi dan defisit pangan. Jika keduanya tak serius ditangani, Indonesia akan bergantung pada luar negeri.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di definisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*. Pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>15</sup>

Dalam ayat di atas dengan sangat jelas bahwa Allah SWT. menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah memiliki dua makna, yaitu menggantikan dan menguasai. Makna menggantikan dapat kita lihat pada ayat 30 Surah al-Baqarah ini. Manusia ditunjuk Allah SWT. sebagai pengganti Allah SWT. dalam mengolah bumi sekaligus memakmurkannya. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menggali potensi-potensi yang terdapat di bumi ini, mengolahnya, dan menggunakannya dengan baik sebagai sarana

---

<sup>15</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h.6.

untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

Makna khalifah yang kedua adalah menguasai atau menjadi penguasa. Makna ini dapat kita temukan dalam kata khalifah yang terdapat dalam Surah S.ad ayat 26 sebagai berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  
(QS.Shad : 26)

Artinya: *"(Allah SWT. berfirman) Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah."*<sup>17</sup>

Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT.menjadikan Nabi Daud a.s. sebagai khalifah di bumi dengan arti menjadi penguasa di kalangan Bani Israel. Saat di antara kaum Bani Israel terdapat perselisihan, Nabi Daud selaku penguasa diperintahkan untuk memberikan keputusan dengan adil.Selaku penguasa, seorang khalifah dituntut untuk senantiasa berbuat adil kepada masyarakatnya. Ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa akan memberikan akibat buruk bagi korbannya dan masyarakat secara umum.

Terlepas dari kedua makna khalifah, manusia menempati kedudukan istimewa di muka bumi ini.Bukan berarti manusia diistimewakan kemudian boleh berbuat semaunya, melainkan sebaliknya. Kedudukan istimewa manusia menuntut kearifan dan tanggung jawab besar terhadap alam dan masyarakatnya.Amanah ini merupakan tugas bagi semua manusia.Dengan demikian, setiap manusia harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.Melakukan tindakan yang dapat merusak alam menyebabkan manusia lalai terhadap tugas yang diembannya.<sup>18</sup>

Menurut Adiwarman A.Karim sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan

---

<sup>16</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.156-157.

<sup>17</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h.454.

<sup>18</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.165.

inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain.<sup>19</sup> Sistem keuangan pada zaman rasululloh digunakan bimetalic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa rasulullah ini relatif stabil dengan nilai kurs dinar dirham 1:10.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukan dalam berhubungan dengan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS Al-An'am: 152)

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ  
وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...*<sup>20</sup>

Permasalahan yang ada di perekonomianpun tentunya menjadi fokus kita dalam pembangunan perekonomian untuk tercapainya perekonomian yang lebih baik sehingga bisa dikatakan perekonomian tersebut sudah sampai di tahap yang mensejahterakan.<sup>21</sup>

Terlepas dari kebijakan apa yang diterapkan oleh bank sentral dalam menangani masalah moneter. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus mengerti bagaimana konsep dalam mencapai kesejahteraan yang benar dan sesuai dengan syariat islam seperti yang di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 34:

<sup>19</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 179.

<sup>20</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h.149.

<sup>21</sup>Perry Warijiyo, *Kebijakan Moneter Diindonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Study Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003) h.2.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
 وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*<sup>22</sup>

Jadi dari ayat tentang kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang telah Allah berikan,<sup>23</sup> tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja, namun yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan surgawi, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang didapat didunia sifatnya hanyalah sementara.

Dalam dunia yang didominasi oleh ekonomi dan keuangan kapitalis (konvensional), Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki kebijakan dalam proses pengendalian perekonomiannya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter, kebijakan moneter yang dikenal luas adalah kebijakan moneter dalam perspektif konvensional. Sejak 30 tahun terakhir, ekonomi dan keuangan Islam telah secara bertahap diterapkan di berbagai negara, secara tunggal maupun berdampingan dengan yang konvensional. Dengan semakin besar dan signifikannya ekonomi dan keuangan Islam, kebijakan moneter dalam perspektif Islam juga ikut berkembang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h. 192.

<sup>23</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 179.

<sup>24</sup>Anisa Noviasari, Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, *JurnalMedia Ekonomi* , (Desember 2012).

Dampak perekonomian global tahun 2020 ini menunjukkan tanda- tanda peneurunan setelah mengalami tekanan berat pada triwulan II 2020 dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju dan berkembang mengalami kontraksi tajam akibat pembatasan mobilitas untuk memitigasi penyebaran pandemic COVID-19. Nilai tukar Rupiah melemah kembali mulai Juli 2020 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada Juli 2020, rupiah mengalami depresiasi 2,36% secara point to point atau 2,92% secara rerata dibandingkan dengan level Juni 2020, dipicu kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat kenaikan tensi geopolitik AS–Tiongkok

Potensi prospek perekonomian global termasuk perdagangan dunia kibat Pandemic Covid-19 ini berdampak pada kenaikan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Kekhawatiran yang samaterus berlanjut sehingga Rupiah pada Agustus 2020 kembali mendapat tekanan. Sampai dengan 18 Agustus 2020, Rupiah melemah 1,65% secara point to point atau 1,04% secara rerata dibandingkan dengan level Juli 2020. Dibandingkan dengan level akhir 2019, Rupiah terdepresiasi 6,48% (ytd). Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut didukung oleh net supply pasokan valas yang memadai.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi, dampak PSBB yang memengaruhi pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi. kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Kondisi likuiditas lebih dari cukup dan transmisi penurunan suku bunga berlanjut ditopang strategi operasi moneter.

Perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah inflasi. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemic COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia.

Sehingga dari permasalahan tersebut perlu diangkat menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Moneter dan Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2017 – 2020 dalam Persepektif Islam”.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu seiring majunya Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar, berdasarkan teori signal dalam dunia inflasi, maka diperlukannya informasi yang mendukung dalam kegiatan inflasi untuk pengambil keputusan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

Batasan masalah digunakan untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta menghindari kesimpangsiuran dalam membahas, penelitian ini terfokus inflasi tinggi maka akan diikuti pula oleh meningkatnya sumber-sumber pembiayaan yang menyebabkan naikan suku bunga bank indonesia. Untuk menekan inflasi maka kebijakan yang diambil adalah menstabilkan tingkat suku bunga sejalan dengan kondisi makroekonomi yang terjadi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Moneter (Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar) dan Transaksi Uang Elektronik Secara Parsial terhadap Inflasi di Indonesia 2017 – 2020 ?
2. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Moneter (Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar) dan Transaksi Uang Elektronik Secara Simultan terhadap Inflasi di Indonesia 2017 – 2020 ?
3. Bagaimana Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik Secara Parsial terhadap Inflasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh

Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik Secara Simultan terhadap Inflasi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam dalam menanggapi masalah inflasi.

## **F. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah khususnya mengenai Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi di Indonesia serta sebagai wahana tambahan referensi serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi di Indonesia

#### **2. Bagi lembaga pendidikan**

Penelitian ini menambah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu, sebagai karya akademis, penelitian ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar dan Transaksi Uang Elektronik terhadap Inflasi di Indonesia.

#### **4. Bagi Ekonomi Syariah**

Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan acuan untuk

meningkatkan kegiatan Ekonomi syariah di Indonesia dalam bidang Moneter dan Inflasi.

5. Bagi Pemberi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pihak yang berwewenang.

## G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian - penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai variable - variabel terkait. Adapun hasil penelitian - penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008) dari Universitas Diponegoro Jawa Tengah, yang berjudul "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah." Penelitian ini memanfaatkan data deret waktu dari 1985-2006 dan data menggunakan analisis regresi "Ordinary Least Square (OLS)" dan pendukungnya perangkat lunak dari SPSS 11.5. Temuan menunjukkan bahwa tenaga kerja, investasi swasta (PMA) dan PMDN) dan pengeluaran pemerintah daerah memberikan dampak positif pada fluktuasi PDRB Jawa Tengah. Juga ditemukan bahwa krisis ekonomi telah terjadi pengaruh signifikan terhadap arah negatif PDRB. Ini adalah Kota yang memiliki banyak uang province. Upaya untuk Peningkatan investasi harus difokuskan pada kegiatan yang melibatkan banyak pekerja. Akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yaitu mampu merangsang peningkatan variabel investasi swasta dan peluang kegiatan ekonomi regional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat per kapita. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah.. Sedangkan untuk penelitian ini adalah tentang Analisis kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2008-

2017.<sup>25</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siwi Nur Indriyani (2016) dari kampus UNKRIS, Jatiwaringin Jakarta Timur yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015” Penelitian ini mempelajari untuk mengetahui pengaruh Inflasi, dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Indonesia Periode 2005 - 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Inflasi, dan Suku Bunga yang menyimpang dari situs web bank. Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 - 2015. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015. Sedangkan untuk penelitian ini adalah tentang Analisis kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi islam tahun 2008-2017.<sup>26</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muara Nangarumba (2016) dari Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun diyakini menjadi indikator yang bisa mendeteksi bagaimana ekonomi aktivitas di suatu area. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit. Sedangkan untuk penelitian ini adalah tentang Analisis kebijakan moneter terhadap

---

<sup>25</sup>Deddy Rustiono, “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, (November 2008).

<sup>26</sup>Siwi Nur Indriyani, Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015, *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana* (Mei 2016).



pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2008-2017.<sup>27</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Noviasari (2012) dari Universitas Trisakti, yang berjudul “Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia.” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter untuk 'mengurangi inflasi' dengan pola Islam secara lebih efektif daripada dengan pola konvensional. Dalam sistem moneter ganda, pendekatan alternatif untuk kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang tidak bertentangan dengan konvensional dan Syariah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. Sedangkan untuk penelitian ini adalah tentang Analisis kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2008-2017.<sup>28</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sriyono (2013) dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang berjudul “strategi kebijakan moneter di Indonesia.” Metode penelitian Penganalisis persamaan simultan dengan metode Dua Tahap Least Squared (TSLS) Itu Hasil dari penelitian menyimpulkan itu (1) jumlah uang beredar punya yang signifikan dan dampak positif pada itu inflasi, jumlah uang beredar dari periode sebelumnya punya Penting dan dampak positif pada itu inflasi, tingkat SBI memiliki signifikan dan negatif berdampak pada inflasi, nilai tukar telah penting dan positif berdampak pada itu inflasi. Sementara ekonomi tidak signifikan dan berdampak positif pada inflasi. (2) Kubah investasi stik, investasi domestik periode sebelumnya, asing investasi, investasi asing dari periode sebelumnya, dan

---

<sup>27</sup>Muara Nangaruba, “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016”, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, (November 2016).

<sup>28</sup>Anisa Noviasari, “Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia”, *Jurnal Media Ekonomi Vol. 20, No. 3*, (Desember 2012).



tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Strategi Kebijakan Moneter Di Indonesia. Sedangkan untuk penelitian ini adalah tentang Analisis kebijakan moneter dan transaksi uang elektronik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi selama tahun 2008-2017.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang apabila dilihat dari sumber data penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan sumber data BI sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis data regresi linear berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu pengukuran Strategi, Efektivitas Mekanisme Kebijakan Moneter menggunakan metode deskriptif Kuantitatif. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sekarang menambah variabel OPT, BI 7 Days, CAR, Transaksi Uang Elektronik dan Nilai Tukar sedangkan pada penelitian terdahulu tidak memakai variabel tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio yang paling andal dalam memprediksi pengaruh tidaknya Kebijakan Moneter terhadap Inflasi.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.
2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

---

<sup>29</sup>Yassirli Amrini, "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Dan Perekonomian Di Indonesi", *Jurnal Kajian Ekonomi*, (2014).

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Teori yang digunakan.
- B. Kajian pustaka penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

## **BAB III METODE PENELITIAN**

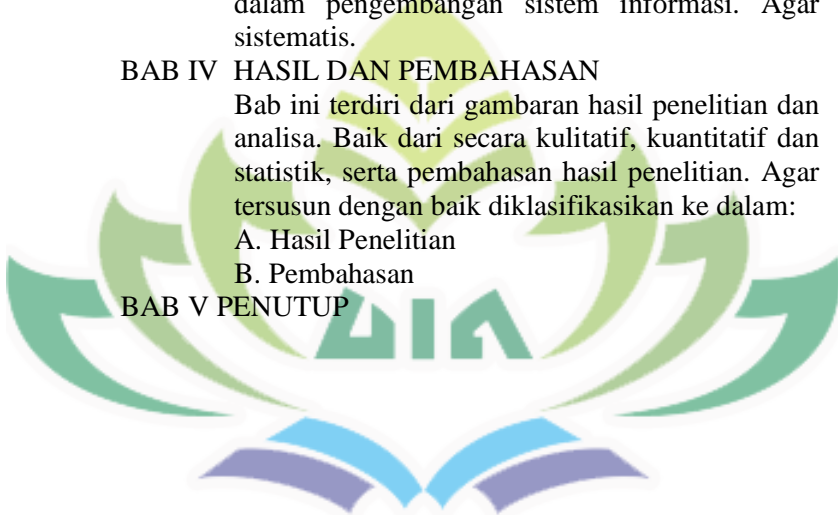
Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

## **BAB V PENUTUP**



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Inflasi

Sukirno (2011:165) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus”. Sedangkan menurut Julius (2011:22) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus”. Selanjutnya menurut Murni (2013:202) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus”. M. Natsir (2014:253) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: “Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus”. Sementara itu Bank Indonesia memberikan pengertian Inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Menurut Bank Indonesia mengemukakan bahwa Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

- a. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan

pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

- b. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Menurut M. Natsir (2014:261) jenis-jenis inflasi yaitu:

1. Inflasi secara umum, terdiri dari:
  - a. Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*) adalah inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi IHK merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi dan inflasi gejala barang (*volatile goods*).
  - b. Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomisecara umum (faktor-faktor fundamental misalnya akseptasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persisten.
  - c. Inflasi harga administrasi (*administered price inflation*) adalah inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena campur tangan (diatur) pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif tol.
  - d. Inflasi gejala barang-barang (*volatile goods inflation*) adalah inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Misalnya, bahan makanan yang bergejolak terjadi pada kelompok bahan makanan yang dipengaruhi faktor-faktor teknis, misalnya gagal panen, gangguan alam atau anolai cuaca.
2. Inflasi berdasarkan asalnya, terdiri dari:
  - a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah

inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri.

- b. Inflasi yang berasal dari manca negara adalah inflasi barang dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum di luar negeri.
3. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, terdiri dari:
  - a. Inflasi tertutup (*closed inflation*) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu.
  - b. Inflasi terbuka (*open inflation*) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.
4. Inflasi berdasarkan sifatnya, terdiri dari:
  - a. Inflasi merayap (*creeping inflation*) adalah inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan presentase yang relatif kecil serta dalam waktu yang relatif lama.
  - b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
  - c. Inflasi tinggi (hiper inflasi) adalah inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam.
5. Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya
  - a. Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya <10% per tahun
  - b. Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun
  - c. Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun
  - d. Inflasi hiper adalah yang besarnya >100% per tahun.
6. Inflasi berdasarkan periode, terbagi menjadi tiga, antara lain:
  - a. Inflasi tahunan (*year on year*), yaitu mengukur IHK periode bulan ini terhadap IHK di periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.
  - b. Inflasi bulanan (*month to month*), mengukur

- IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya.
- c. Inflasi kalender atau (*year to date*), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK awal tahun”.

Menurut M. Natsir (2014:255) faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun ekspektasi. Yaitu:

1. Kedua yang menyebabkan inflasi adalah faktor penawaran dan kenaikan harga-harga (inflasi) yang ditimbulkan dinamakan sebagai *cost push inflation* atau *shock inflation*. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya- biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*).
2. Inflasi karena tarikan permintaan yaitu kenaikan harga-harga yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang.
3. Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*)  
Faktor jasa akibatnya, produsen harus menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang (*sustainable*).
4. Inflasi karena ekspektasi  
Ekspektasi inflasi sangat berpengaruh dalam pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Jika para pelaku ekonomi, baik individu, dunia usaha berfikir bahwa laju inflasi pada periode lalu masih akan terjadi di masa yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Para pelaku usaha akan memperhitungkan biaya produksi dengan kenaikan tingkat harga seperti pada waktu yang lalu (Suseno dan Astiyah, 2009 dalam M. Natsir, 2014)”.

Menurut Bank Indonesia Inflasi diukur dengan IHK di Indonesia di kelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose – COICOP*), yaitu:

- a. Kelompok bahan makanan
- b. Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau
- c. Kelompok perumahan
- d. Kelompok sandang

- e. Kelompok kesehatan
- f. Kelompok pendidikan dan olah raga
- g. Kelompok transportasi dan komunikasi

Menurut M. Natsir (2014:266) rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

$$INF_n = \frac{IHK_n - 1}{IHK_{n-1} - 1} \times 100$$

Keterangan:

- $INF_n$  : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)
- $IHK_n$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)
- $IHK_{n-1}$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

## 2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu Negara. Keuangan yang sering kali berubah-ubah dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi membuat sebuah Negara mengatur hal tersebut dengan suatu kebijakan. Stabilitas finansial dibutuhkan setiap negara untuk menjaga harga, inflasi serta output dalam keadaan stabil. Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pasar. Agar hal ini bisa dicapai, Bank Sentral yang juga dikenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan Negara agar lebih terkendali. Seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja serta laju inflasi yang terkendali. Perekonomian Negara selalu mendapatkan perhatian lebih karena sumbangsinya untuk Negara yang sangat besar. Pemerintah senantiasa mengamati pembangunan ekonomi, dan jika diperoleh keadaan yang menyimpang maka disinilah otoritas moneter mengambil tindakan. Pemerintah akan mengambil langkah kebijaksanaan untuk mengatasi masalah tersebut melalui otoritas moneter yakni kebijakan moneter.

Otoritas moneter dalam hal ini Bank Sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan



pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam UU Nomor 3 tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya. Tercatat sejak tahun 2005, setelah diresmikannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan yang disebut sebagai *Inflation Targeting Framework* ini menganut sistem *free floating* yang memiliki berperan dalam kestabilan harga dan financial Negara. Bank Indonesia hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarahkannya ke tingkat tertentu. Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini BI berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrument-instrumen khusus.

Tahun 1998 terjadi krisis moneter dan menyebabkan perekonomian Indonesia terguncang, belum lagi aksi protes dari berbagai pihak dengan segala tuntutan. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan khusus yang digunakan untuk mengatur peredaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan yakni:

- a. *Monetary Expansive Policy* (Kebijakan Moneter Ekspansif)

*Monetary Expansive Policy* merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. *Monetary expansive* juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam

Negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara dengan risiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

- b. *Monetary Contractive Policy* (Kebijakan Moneter Kontraktif)

*Monetary Contractive Policy* merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru *menambah* peredaran uang. Pengurangan peredaran jumlah uang ini juga dikenal dengan politik uang ketat (*Tight Money Policy*).

Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk *menurunkan* tingkat inflasi yang dialami oleh Negara. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah suku bunga bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan meningkatkan persyaratan cadang bank juga termasuk cara mengurangi peredaran uang. Dalam penerapannya, pemerintah menggunakan beberapa langkah-langkah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

### 3. BI Rate dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate

Faktor penentu utama dari penetapan nilai *BI Rate* adalah inflasi di Indonesia. Inflasi dipengaruhi oleh banyaknya peredaran mata uang di dalam negeri dan jumlah produksi dan permintaan masyarakat yang *berakibat* pada naik-turunnya harga-harga. Jika inflasi naik maka *BI Rate* juga ikut naik, dan sebaliknya jika inflasi turun maka Bank Indonesia akan menurunkan besaran *BI Rate*. Imbas dari perubahan nilai *BI Rate* tidak hanya pada naik-turunnya harga saja, melainkan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara secara global.

Saat *nilai* inflasi meningkat, maka suku bunga kredit dan deposito juga akan naik sehingga mengurangi laju peredaran mata uang di masyarakat. Sedangkan jika

perekonomian sedang lemah, maka Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* untuk menstimulus perkembangan industri kecil dan sektor perekonomian lainnya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi agar perekonomian negara tetap stabil.

Dalam hubungannya dengan perekonomian masyarakat, penetapan nilai *BI Rate* juga sangat mempengaruhi *kondisi* perekonomian sehari-hari. Misalnya ketika harga bahan-bahan pokok melonjak tajam karena kesulitan panen atau kelangkaan bahan pokok tertentu, maka *BI Rate* akan turun untuk memacu perputaran kredit di masyarakat. Dengan membaiknya perekonomian dan bertambahnya peredaran uang, diharapkan harga bahan pokok tersebut menjadi turun dan kemudian stabil kembali. Sedangkan dalam mencegah inflasi, *BI Rate* juga sangat penting untuk mengontrol uang yang beredar di masyarakat. Saat terjadi kenaikan inflasi, lembaga bank lebih suka menyimpan uangnya pada Bank Indonesia sehingga perlahan-lahan uang yang beredar akan berkurang.

Walau demikian, bukan berarti setelah *BI Rate* turun, bank yang lain bisa langsung mendapatkan kembali uang yang *disimpan* di Bank Indonesia untuk diputar ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank-bank harus menunggu selama setahun untuk mengambil kembali simpanan dana tersebut sehingga peredaran uang di masyarakat tidak akan meningkat dalam hitungan hari atau bulan.

Laju nilai inflasi juga tidak akan langsung menurun setelah Bank Indonesia mengumumkan penurunan *BI Rate* karena ada juga bank yang tetap memilih menyimpan dana mereka sesuai dengan kebijakan dan strategi usaha masing-masing. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Bank Indonesia juga tidak serta merta terwujud dalam kurun waktu singkat.

Untuk mengatasinya, Bank Indonesia berinisiatif menerbitkan *BI 7-Day (reverse) Repo Rate* yang lebih singkat rentang waktunya. Melalui kebijakan ini, lembaga perbankan tidak perlu lagi menunggu hingga setahun untuk menarik kembali dana yang disimpan di Bank Indonesia. Dalam rentang 7 hari dan kelipatannya (14 hari, 21 hari, dst) Bank sudah bisa menarik uang tersebut beserta bunga terbaru yang ditetapkan pada saat penarikan uang.

Memang suku bunga yang didapat pastinya jauh lebih kecil daripada *BI Rate* karena rentang penarikan yang lebih *pendek*, namun hasilnya bisa cukup besar karena berpengaruh terhadap kelancaran pemberian kredit kepada masyarakat. Hal ini juga diharapkan bisa memperkecil resiko kredit macet karena perubahan suku bunga pertahun yang bisa melonjak tajam sehingga mempengaruhi kestabilan pengeluaran dan pemasukan nasabah.

Kebijakan terbaru dari Bank Indonesia ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia dengan lebih cepat hingga ke taraf yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya acuan lain selain *BI Rate* yang baru bisa dicairkan setelah satu tahun, bank-bank lain lebih berani menurunkan suku bunga kredit *ataupun* menaikkan suku bunga deposito.

Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih yakin saat mengambil kredit jangka panjang karena tidak perlu khawatir lagi akan suku bunga fluktuatif yang bisa sangat berpengaruh pada cicilan bulanan. Perlu diketahui *bahwa* kenaikan suku bungapertahun sebenarnya sangat signifikan terhadap besaran cicilan yang harus dibayar saat mengambil kredit jangka panjang. Banyak masyarakat yang masih enggan mengambil pinjaman pribadi maupun kredit pembelian barang dengan harga tinggi seperti kendaraan atau properti.

Naiknya bunga deposito juga diharapkan dapat memacu jumlah nasabah yang menyimpan uang di bank untuk jangka *waktu* tertentu. Banyaknya deposito yang masuk akan sangat berpengaruh pada perputaran uang di bank sehingga diharapkan akan menambah anggaran kredit untuk industri kecil dan menengah yang merupakan salah satu tonggak perekonomian penting suatu Negara.

#### **4. Operasi Pasar Terbuka**

“Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka Operasi Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter. Operasi Pasar Terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.”

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan

dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan intervensi Rupiah. Tujuan Operasi pasar terbuka bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. **Mempengaruhi jumlah uang beredar:** baik untuk memperbesar dan *memperkecil* jumlah uang yang beredar.
- b. **Mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah:** perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan dengan mulus ketika kestabilan harga dapat dijaga. Artinya, inflasi juga dijaga tetap rendah.
- c. **Mendorong pertumbuhan investasi:** jumlah investasi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan kerja yang cukup luas dan secara simultan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sehingga, diharapkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sesuai dengan yang telah direncanakan.

Operasi Pasar Terbuka terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. **OPT Absorpsi**  
OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui penurunan suku bunga PUAB secara tajam.
- b. **OPT Injeksi**  
OPT injeksi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga PUAB secara tajam.

## 5. Kurs

Kurs juga sering disebut dengan nilai tukar mata uang. Kurs memiliki peranan penting dalam hal transaksi, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Kenapa? karena

kurs mampu menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang yang berbeda dari negara-negara lain.

Selain itu, kurs juga memiliki peranan yang penting di dalam pasar valuta asing atau yang biasa disebut dengan forex. Di dalam pasar valuta asing ini, akan terjadi pertukaran mata uang dengan kurs yang sudah disetujui oleh berbagai pihak yang bersangkutan.

Kurs juga bisa mengalami dua macam perubahan di dalamnya, yakni apresiasi dan juga depresiasi.

Arti dari apresiasi dalam hal ini adalah suatu peningkatan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Apresiasi akan terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing.

Apabila mata uang dari negara lain mengalami suatu apresiasi pada mata uang dari negara lain, maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih mahal dan kegiatan impor menjadi murah.

Sedangkan depresiasi adalah suatu penurunan pada nilai mata uang lokal terhadap mata uang dari negara lain. Apabila mata uang lokal mengalami depresiasi atas mata uang dari negara lain, maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih murah dan kegiatan impor menjadi lebih mahal.

Biasanya, ada tiga jenis kurs yang saat ini berlaku di dunia, yakni kurs beli, kurs jual dan juga kurs tengah.

a. **Kurs Beli**

Kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank, penukaran mata uang asing, dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing.

b. **Kurs Jual**

Kurs jual merupakan kurs yang digunakan oleh pihak bank, *money changer* atau tempat penukaran mata uang dan juga pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing.

c. **Kurs Tengah**

Kurs tengah adalah suatu kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah bisa diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli lalu kemudian hasilnya dibagi dua.

Di dalam pasar valuta asing, terdapat berbagai jenis transaksi. Jenis transaksi tersebut adalah spot, berjangka dan juga swap.

a. **Transaksi Spot** (*Spot Transaction*)

Transaksi spot merupakan suatu proses transaksi jual beli terhadap mata uang asing yang kegiatannya langsung dilakukan di lokasi pertukaran. Umumnya, transaksi ini dilakukan untuk suatu keperluan yang mendesak dan juga membutuhkan keperluan yang praktis.

b. **Transaksi Berjangka** (*Forward Transaction*)

Transaksi berjangka adalah suatu transaksi dengan menggunakan sejumlah mata uang lain yang dilakukan pada waktu yang akan datang atau dilain hari.

Dalam kegiatan transaksi tersebut, setiap pihak yang terlibat di dalamnya sudah menyepakati penukaran mata uang pada waktu yang akan datang dengan harga kurs yang sudah disepakati.

c. **Transaksi Swap** (*Swap Transaction*)

Transaksi swap adalah suatu transaksi penjualan dan juga pembelian yang dilakukan secara bersamaan dengan jumlah tertentu dari mata uang dengan dua tanggal penyerahan mata uang yang berbeda.

Ada lima faktor yang mampu memengaruhi kurs, kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Inflasi**

Seperti yang sudah kita ketahui, dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa. Hal ini membuat adanya perubahan pada harga mata uang lokal dan harga mata uang asing. Kondisi ini mampu menyebabkan pergerakan pada kurs valuta asing.

b. **Kegiatan Neraca Pembayaran**

Nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal.

Disisi lain, pasif nya suatu saldo pembayaran, yang mana debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing, akan menyebabkan



penurunan nilai tukar terhadap mata uang nasional.

Tingkat keterbukaan ekonomi juga akan turut menentukan ukuran dan dampak dari neraca pembayaran dalam nilai tukar mata uang. Seperti, efek perubahan tarif, kuota perdagangan, subsidi ekspor, pembatasan impor barang, dll.

c. **Perbedaan Suku Bunga di Berbagai Negara**

Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut memengaruhi arus modal internasional.

d. **Kontrol Pemerintah**

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga akan turut memengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Berbagai contoh dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang.

e. **Ekspektasi**

Faktor lainnya yang turut memengaruhi nilai tukar pada valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan.

Instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka. Instrumen ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang dengan jalan melakukan penjualan atau pembelian terhadap *government securities* atau surat berharga pemerintah.

Jika ingin menambah peredaran jumlah uang, pemerintah akan membeli *government securities* yang beredar di pasar. Dengan kata lain, pemerintah menambah jumlah uang yang beredar di pasaran dengan pembayaran terhadap surat berharga tersebut.

Namun, jika ingin peredaran uang berkurang, pemerintah justru akan melakukan hal sebaliknya yakni menjual *government securities* (SBI dan SBPU) tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, uang yang ada di pasar akan diserap sehingga jumlahnya akan berkurang.

a. *Fasilitas Diskonto*

*Discount Rate* adalah upaya pemerintah dalam mengatur

tingkat suku bunga yang ada pada bank sentral maupun bank umum untuk mengatur peredaran rupiah. Penurunan suku bunga pada bank sentral merupakan usaha pemerintah menambah peredaran rupiah dalam Negara. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran rupiah maka menaikkan suku bunga adalah jalan yang harus ditempuh.

b. *Suku Cadangan Wajib*

*Reserve Requirement Ratio* adalah cara mengatur, baik menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadang yang ada pada pengatur kebijakan. Menurunkan rasio cadangan wajib yang diberlakukan di bank merupakan usaha pemerintah meningkatkan peredaran rupiah. Hal ini berlaku sebaliknya saat pemerintah ingin menurunkan peredaran rupiah.

c. *Himbauan Moral*

*Moral Persuasion* adalah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Himbauan ini seperti menghimbau pihak bank untuk selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekan peredaran jumlah uang. Hal ini juga berupa himbauan kepada bank melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar ke bank sentral untuk memperbanyak peredaran rupiah.

d. *Kebijakan Kredit Selektif*

Terakhir ada kebijakan kredit selektif yang juga diberlakukan Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki kebijakan untuk menentukan jenis pinjaman yang boleh atau tidak, serta pinjaman yang perlu ditambah atau dikurangi.

## 6. Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam

Undang- undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut Rivai (2001) uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. Sedangkan menurut Hidayati (2006:4) pengertian uang elektronik (*e-money*) mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* mendefinisikan uang elektronik sebagai “*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (produk *stored- value* atau *prepaid* dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).

Menurut Bank Indonesia (2006), secara umum fitur *e-money* memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*, yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- b. Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *offline*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*), tanpa harus *online* ke komputer penerbit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik *menjelaskan* bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang

data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit(*unregistered*).

**Tabel 2.1**  
**Fasilitas Uang Elektronik *registered* dan *unregistered***

<b>Registered</b>	<b>Unregistered</b>
Registrasi Pemegang,	Pengisian Ulang (top up),
Pengisian Ulang (top up),	Pembayaran transaksi,
Pembayaran transaksi,	Pembayaran tagihan,
Pembayaran tagihan,	Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Transfer dana,	
Tarik Tunai,	
Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.	

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014

Menurut peraturan Bank Indonesia No16/8/PBI/2014, berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, maka juga terbagi 2(dua) jenis yaitu:

1) Uang elektronik berbasis kartu atau *chip*

Dimana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis kartu atau *chip* dan memungkinkan transaksi dilakukan secara *offline*.

2) Uang elektronik berbasis *server*

Dimana nilai dana pemegang tersimpan pada *database* penerbit dan dalam melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa *gadget* pengguna untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan dan menerima nomor token untuk melakukan transaksi. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis *server* dan hanya dapat dilakukan secara *online*.

**Gambar 2.1**  
**Produk - Produk Uang**  
**Elektronik**



Sumber: Bank  
Indonesia

Menurut Bank Indonesia (2006), jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) secara umum, antara lain:

- 1) Penerbitan (*issuance*) dan pengisian ulang (*top up*)  
Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang uang elektronik bisa melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyeteroran uang tunai, pendebitan uang dari rekening bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.
- 2) Transaksi Pembayaran  
Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada prinsipnya dilakukan penukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang uang elektronik dan pedagang menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan.
- 3) Transfer  
Transfer dalam transaksi uang elektroni adalah fasilitas pengiriman nilai uang antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus.
- 4) Tarik Tunai  
Tarik tunai adalah fasilitas penarikan uang tunai atas nilai

uang elektronik yang tercatat pada media *e-money* yang dimiliki pemegang, yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang uang elektronik.

5) *Refund* atau *Redeem*

*Refund* atau *redeem* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya**

<b>Uang Elektronik</b>	<b>APMK Lainnya</b>
Nilai yang tercatat tersimpandalam instrument media elektronik	Tidak ada pencatatan nilai uangpada instrument kartu
Dana sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan bank
Transaksi pembayaran dilakukan secara offline kepada penerbit	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>online</i> kepadapenerbit

Sumber: Siti Hidayati, dkk (2006)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, beberapa pihak yang terkait dengan *penyelenggaraan* uang elektronik sebagai berikut:

- 1) Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- 2) Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- 3) *Acquirer* adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia barang atau jasa sehingga mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada

- penyedia barang atau jasa.
- 4) Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan, pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban, penyelesaian pembayaran dan penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uang Elektronik.
  - 5) Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.
  - 6) Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
  - 7) Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
  - 8) Penyedia Barang atau Jasa (merchant) adalah pihak yang menjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.
  - 9) Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Hubungan antara transaksi uang elektronik dengan inflasi

Penggunaan e-money akan mempengaruhi JUB kemudian akan berpengaruh terhadap laju inflasi. Pembayaran dengan e-money mempunyai sifat yang praktis dan cepat sehingga penggunaan e-money akan meningkatkan kecepatan perputaran uang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyatama dan Apriansah (2010). Penyebaran emoney cenderung masih perlahan dan belum mempunyai peran yang besar dalam perekonomian Indonesia meskipun begitu berdasarkan pendekatan keseimbangan uang yang sesungguhnya, keduanya menyatakan bahwa penggunaan



e-money mempunyai dampak pada kecepatan perputaran uang.

Pada akhirnya inflasi akan mengalami peningkatan. Sifat e-money yang mudah, cepat, dan praktis tersebut memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, jumlah uang beredar pada masyarakat pun akan meningkat, hal tersebut sangat memungkinkan dalam peningkatan tingkat konsumsi masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Jati (2015) yang mengungkapkan bahwa teknologi sangat berperan dalam mendorong konsumsi, utamanya pada masyarakat kelas menengah agar lebih konsumtif. Kehadiran e-money menjadi salah satu cara untuk mendorong masyarakat agar lebih konsumtif. Sentuhan teknologi dalam konsumsi melalui adanya e-money memberi warna baru dalam memaknai konsumsi. Tingkat konsumsi yang mengalami kenaikan secara terus menerus pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan inflasi.

Selain mempengaruhi tingkat konsumsi adanya pembayaran nontunai termasuk di dalamnya emoney, ikut mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Sebelum ada alat pembayaran nontunai, pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan diwujudkan dalam bentuk uang. Namun setelah adanya perkembangan teknologi dan pembayaran nontunai, seseorang tidak perlu memegang seluruh pendapatannya dalam bentuk uang melainkan disimpan dalam sebuah media yang mempunyai nilai uang.

## **1. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Inflasi**

### **a. Teori Inflasi dalam Perspektif Islam**

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya mereka (konsumen) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. (Al-Maqrizi, 1986 :30 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005 : 268).

Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja melainkan karena faktor kesalahan manusia. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya Al-Maqrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi (dua), yaitu (1) faktor alamiah (*Natural inflation*) dan inflasi karena kesalahan manusia (*Human Error Inflation*).

### 1. *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. (Adiwarman Karim, 2014 : 425) Al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). (Adiwarman Karim, 2006 : 140).

Jika memakai perangkat konvensional yaitu persamaan identitas :

$$MV = PT = Y$$

Di mana:

- M = Jumlah uang beredar
- V = Kecepatan peredaran uang
- P = tingkat harga
- T = Jumlah barang dan jasa (Q)
- Y = Tingkat pendapatan nasional (GDP)

Maka *Natural Inflation* dapat diartikan sebagai:

- a) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya  $T \downarrow$  sedangkan M dan V tetap maka konsekuensinya  $P \uparrow$ .
- b) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan  $M \downarrow$  sehingga jika V dan T

tetap maka  $P \uparrow$ . (Adiwarman Karim, 2006 : 140).  
 Lebih jauh jika dianalisis dengan persamaan :

$$AD = AS$$

$$AS = Y$$

$$AD = C + I + G + (X-M)$$

Di mana:

$Y$  = Pendapatan Nasional

$C$  = Konsumsi

$I$  = Investasi

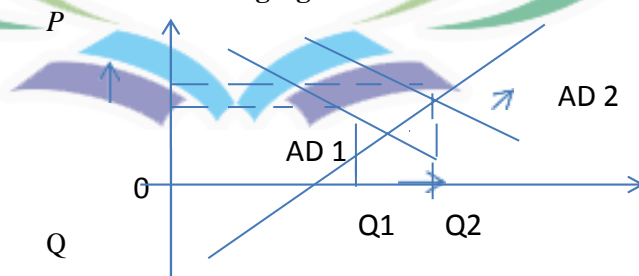
$VG$  = Pengeluaran Pemerintah  $(X - M) = net$

*export*

Maka *Natural Inflation* akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :

Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor ( $X \uparrow$ ) sedangkan impor ( $M \downarrow$ ) sehingga *net export* nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif ( $AD \uparrow$ ). Secara Grafis halini dapat digrafikan sebagai berikut:

**Grafik 2.1**  
**Permintaan Agregatif**



(Adiwarman Karim, 2007: 141)

Akibat dari turunnya tingkat produksi ( $AS \downarrow$ ) karena terjadinya pacekelik, perang, ataupun embargo dan *boycott*.

## 2. Human Error Inflation

Selain karena faktor alam inflasi disebabkan

oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Inflasi ini dikenal dengan istilah human error inflation atau False Inflation. Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 41

“Telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut Al-Maqrizi inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia antara lain korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

#### a) Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana.

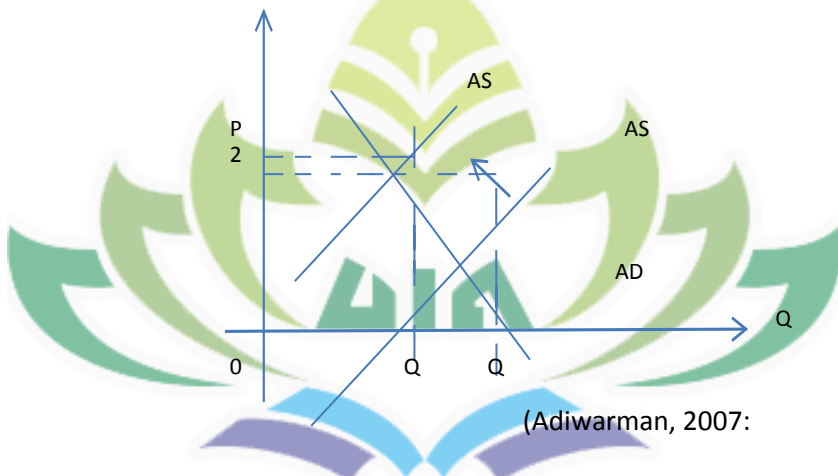
Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi. Kondisi ini, selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup.

Mereka berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara.

(Al-Ashraf Sha'ban, 1376 dalam Al-Maqrizi 1986: 52-53 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005 : 270). Jika kita merujuk pada persamaan  $MV = PT$ , maka korupsi akan mengganggu tingkat harga ( $P \uparrow$ ) karena produsen akan menaikkan harga jual produksinya untuk menutupi biaya-biaya “siluman” yang telah mereka keluarkan tersebut. Jika merujuk pada persamaan AS-AD maka akan terlihat korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk akan mengakibatkan kontradiksi pada kurva penawaran agregatif ( $AS \downarrow$ ). (Adiwarman, 2014 : 143).

Hal tersebut tercermin dalam gambar berikut ini:

**Grafik 2.2**  
**Kurva Penawaran Agregatif**



**b) Pajak yang berlebihan**

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat.

Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa

tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar hingga melebihi jangkauan para petani.

Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi yang dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan. Akibatnya para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya dari pada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 50-51 dikutip dalam Adiwarmanto Azwar Karim, 2007 : 428).

Peningkatan sirkulasi Mata Uang Fulus, pada awalnya uang fulus yang mempunyai nilai instrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran.

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan

biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 71 dikutip dalam Adiwarmman Azwar Karim, 2007 : 429).

Lebih jauh, Al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan, sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat diperedaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 71 dikutip dalam Adiwarmman Azwar Karim, 2007 : 429).

Kedadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-Maqrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 72 dikutip dalam Adiwarmman Azwar Karim, 2007 : 429).

Kedua faktor penyebab timbulnya inflasi ini baik natural maupun human error inflation berawal dari keinginan manusia untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dalam jumlah yang melebihi kemampuannya, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terjadinya ketidakseimbangan, kelangkaan dan kenaikan harga. (Westi, 2003 : 59)

#### c) Akibat Inflasi

Menurut ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena beberapa hal:



- Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran dimuka dan fungsi unit perhitungan. Akibat dari inflasi itu orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali (*self feeding inflation*).
- Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (turunya MPS)
- Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non premier dan mewah (naiknya MPC)
- Mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. (Westi, 2003 : 59)

Selain itu inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi seperti :

- Apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan metode biaya historis atau biaya aktual
- Pemeliharaan modal riil dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner
- Inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi untuk mendapatkan kebutuhan waktu dan tempat. (Adiwarman Karim, 2003 : 139).

#### d) Solusi Mengatasi Inflasi dalam Perspektif Islam

- Abdul Qodim Zallum dalam bukunya sistem keuangan di negara khalifah mengungkapkan bahwa “ sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. ( M. Hatta, 2016)
- Pelarangan impor jika memang produksi dalam

negri masih mencukupi

- Hal ini pernah terjadi semasa pemerintahan khalifah Umar ibn Khattab r.a.

Pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli dari luar negeri lebih sedikit nilainya dari pada yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya belimasyarakat akan naik. Naiknya permintaan Agregatif ( $AD \uparrow$ ), atau pada grafik dilukiskan sebagai AD yang bergeser ke kanan, akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan ( $P \uparrow$ ). (Adiwarman Karim, 2003 : 141)

Apa yang dilakukan oleh khalifah Umar ibn Khatab r.a untuk mengatasi hal permasalahan tersebut? Beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang- barang komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya turunya permintaan agregatif ( $AD \downarrow$ ) dalam perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali normal. (Adiwarman Karim, 2003 : 14)

#### **b. Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter**

Beberapa mazhab *instrumen* kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain (Manan, 2012):

##### **1. Mazhab pertama (Iqtishaduna)**

Pada masa awal islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi (*negotiable instruments*) dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang.

Promissory notes atau bill exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat

dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa.

Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran islam yang melarang praktek riba.

## 2. Mazhab Kedua (Mainstream)

Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Alquran melarang praktek penumpukan uang (money hoarding) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

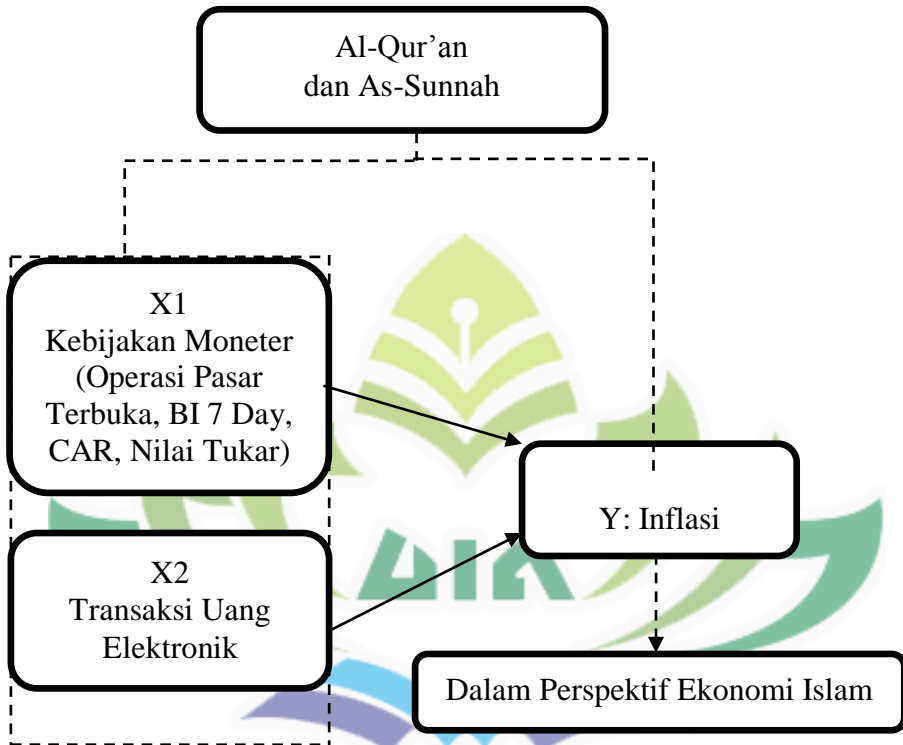
Permintaan dalam islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (transaction motive) dan motif berjaga-jaga (precautionary motive). Semakin banyak uang yang menganggur (idle) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. Dues of idle fund adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur.

## B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh kebijakan moneter dan transaksi uang elektronik terhadap inflasi di indonesia tahun 2017 – 2020 dalam

persepektif islam maka disusunlah kerangka berfikir yang sesuai dengan penelitian di atas melalui gambar berikut:

### Bagan 1 Kerangka Berpikir



**Keterangan :**       Uji Parsial  
                               Uji Simultan

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka berpikir di atas penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X1 : Kebijakan Moneter (Operasi Pasar Terbuka, BI 7 Day, CAR, Nilai Tukar) dan X2 : Transaksi Uang Elektronik terhadap variabel

Y (Pertumbuhan Ekonomi). Sehingga dari kerangka berpikir diatas dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian.

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis memiliki fungsi penting dalam penelitian, yakni menunjukkan arah yang jelas pada pelaksanaan penelitian berdasar hasil yang didapat, sehingga dapat disimpulkan hipotesis merupakan jawaban sementara pada masalah penelitian dan kebenarannya harus diuji dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>30</sup>

Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh jumlah uang, dengan asumsi kecepatan perputaran uang dan volume barang yang diperdagangkan tetap. Teori tersebut dibantah oleh Keynes. Keynes mengungkapkan bahwa jumlah uang bukan satusatunya penyebab inflasi. Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya

Hasil regresi dengan metode analisis OLS didapatkan beberapa temuan yang menggambarkan hubungan antara JUB, e-money, dan BI Rate terhadap inflasi di Indonesia. Hasil analisis kuantitatif yang digunakan dalam menjawab pertanyaan empiris menggunakan metode OLS menunjukkan bahwa secara simultan (keseluruhan) ketiga variabel bebas yang terdiri dari JUB, emoney, dan BI Rate mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia. Tidak adanya kesamaan hubungan hasil uji dengan teori dapat pula disebabkan karena keputusan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sipayung dan Budhi (2013) yang memaparkan bahwa JUB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada periode 1993-2012. Hubungan negatif antara JUB dan inflasi juga ditunjukkan oleh penelitian Nugroho (2012). Hal tersebut dikarenakan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri dari M1(uang kartal dan uang giral pada

---

<sup>30</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2017), 147.

masyarakat) + uang kuasi. Presentase uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valas milik swasta cukup besar, sehingga uang kuasi mempunyai nilai yang tidak likuid. Walaupun uang kuasi mempunyai nilai yang tinggi tetapi tidak akan cukup untuk mempengaruhi inflasi dalam perekonomian.

Seperti yang kita ketahui hipotesis untuk pengujian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Kebijakan Moneter dan OPT memiliki pengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia
- H<sub>2</sub> : Kebijakan Moneter dan BI 7 Day memiliki pengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia
- H<sub>3</sub> : Kebijakan Moneter dan CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia
- H<sub>4</sub> : Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia
- H<sub>5</sub> : Kebijakan Moneter dan Transaksi Uang Elektronik memiliki pengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia
- H<sub>6</sub> : Kebijakan Moneter dan OPT, BI 7, CAR, Nilai Tukar, Transaksi Uang Elektronik Secara Simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Afiif dan Ridwan Idris, Pengaruh Implementasi Manajemen Kelas Terhadap Prilaku Belajar Mahasiswa Pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, *Lentera Pendidikan*, Vol. 19 No.2, Desember 2016.
- Ahmad Salabi, Konsepsi Manajemen Kelas: Masalah dan Pemecahannya, *Jurnal Tarbiyah (Jurnal Ilmiah Pendidikan)*, Vol. 5 Nomor 2 p-ISSN 2088-6991 e-ISSN 2548-8376, Desember 2016.
- Ahmad Susanto, *Teori Belajar Pembelajaran* (cet.4), Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen agama RI*, Jawa Barat: CV Diponegoro, 2011.
- Avrizki Karanado, Wawancara dengan Peserta Didik, SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, 30 Maret 2019.
- Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Suka-Press, 2014.
- , *Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer Formula Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Departemen agama RI Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jawa Barat: CV Diponegoro, 2011.
- Dendi Andara Prasetya, Wawancara dengan Peserta Didik, SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, 30 Maret 2019.
- Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet.5), Bandung: Alfabeta, 2013.
- Erwin Widiasworo, *Cerdas Pengelolaan Kelas* (cet.1), Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Kelas, Guru Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, Dan Berprestasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.



- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*, (cet.12), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Faizal Djabibi, *Manajemen Pengelolaan Kelas*, Malang Jatim: Madani, 2016.
- Gunawan, “Variasi Suara Dan Sikap Guru Dalam Proses Belajar Mengajar”, (Online), tersedia di: <https://www.blog-guru.web.id/2012/04/variati-suara-dan-sikap-guru-dalam.html?m=1> (didownload pada tanggal 18 Januari 2019).
- <https://rumaysho.com/16311-hadits-arbain-01-setiap-amalan-tergantun-pada-niat.html> (didownload pada hari Selasa, jam 05.30 tanggal 28 Mei 2019).
- I Gusti Ketut Arya Sunu, *Manajemen Kelas*, Yogyakarta: Ruko Jambusari, 2015.
- Istihana, *Pengelolaan Kelas Di Madrasah Ibtidaiyah, Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 5 Nomor 2 p-ISSN 2355-1925, Desember 2015.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (cet.32), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardia Hi Rahman, *Pengelolaan Kelas, Motivasi Belajar, Dan Hasil Belajar*, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 15 Nomor 2 ISSN 1693-4164, Juni 2017.
- Moh. Khoerul Anwar, *Pembelajaran Mendalam Untuk Membentuk Karakter Siswa Sebagai Pembelajar*, *Tadris Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*. Vol. 2 Nomor 2 p-ISSN 2301-7562 e-ISSN 2597-7964 DOI: 10.24042/tadris.v2i2.1559, Desember 2017.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (cet.27), Bandung: PT Rosdakarya, 2013.
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2018.
- Mukhlis Anwar, *Buku Pembelajaran PPKN*, Semarang: Wisma Putra, 2016.
- Mursalin, Sulaiman, Nurmasiyah, *Peran Guru Dalam Pelaksanaan Manajemen Kelas Di Gugus Bungong Seulanga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2017.

- M. Anang Sholikhudin, Halimatus Sa'diyah, Model Pengelolaan Kelas Dalam Pembelajaran PAI Di SD Riyadlul Arkham Tembung Plintahan Pandaan, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 Nomor 2 P-ISSN 2477-8338 E-ISSN 2548-1371, Juni 2017.
- Nauval Fauzan, Wawancara dengan Peserta Didik, SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, 06 April 2019.
- Nok Pasikha, Implementasi Manajemen Kelas Dalam Mengatasi Masalah Disiplin Siswa, *Jurnal Dialektika Jurusan PGSD*, Vol. 7 Nomor 1 ISSN 2089-3876, Maret 2017.
- Novan Ardi Wiyani, *Manajemen Kelas, Teori Dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas Yang Kondusif* (cet.1), Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Nur Asiah, Paradigma Kontemporer Sistem Pembelajaran Pendidikan Keguruan Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), *Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 3 Nomor 2 p-ISSN 2355-1925, Desember 2016.
- Nurhadi dan Maria Sanprayogi, Implementasi Manajemen Kelas Di Mts Jabal Nurrohman Kasreman Kabupaten Ngawi Jawa Timur, *Al-Asasiyya: Journal Basic Of Education*, Vol. 02 Nomor 01 ISSN 2548-9992 (Juli 2017).
- Nursukawati, Wawancara pra survey, SD Negeri 1 Harapan Jaya, Bandar Lampung, 24 September 2018.
- Nurul Hidayah, Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sebagai Calon Pendidik Profesional, *Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 5 Nomor 1 p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-8915, Juni 2018.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (cet.4), Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Rosma Elly, Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Di SD Negeri 10 Banda Aceh, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3 Nomor 4 ISSN 2337-9227, Oktober 2016.
- Sabila, Wawancara dengan Peserta Didik, SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, 30 Maret 2019.
- Salinan Badan Standar Nasional Pendidikan, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Proses*, Nomor 41 Tahun 2007, (didownload tanggal 09 Desember 2018).

Slemeto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi* (cet.6), Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (cet.21), Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhartono, Wawancara dengan kepala sekolah, SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, 22 September 2019.

Sungkring, Pendidik Dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik, *Tadris Jurnal Keguruan Ilmu Tarbiyah*, Vol. 1 Nomor 1 ISSN 2301-7562, Juni 2016.

Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

Syfa Aulia, Wawancara dengan Peserta Didik, SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, 30 Maret 2019.

Syofnidah Ifrianti, Membangun Kompetensi Pedagogik dan Keterampilan Dasar Mengajar Bagi Mahasiswa Melalui *Lesson Study*, *Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 5 Nomor 1 p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-8915, Juni 2018.

Zainal Asril, *Micro Teaching* (cet.2), Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

